



Analisis Konflik Sudan dan Sudan Selatan Pasca Referendum Pemisahan Diri Sudan Selatan dari Sudan

Putri Cahyanti

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Conflict is a circumstance which conflict actors such as individuals or groups have dispute between each other to gain the same goal(s). Conflict actors may use violent or peaceful means to settle the conflict. One way to end it is to use referendum of secession if conflict happens within a state territory. South Sudan did referendum of secession in 2011 due to prolonged conflict with Sudan since 1955. But in fact, after South Sudan's independence, conflicts have continued between Sudan and South Sudan such as oil conflicts and border conflicts. This research's aim is to know why Sudan and South Sudan still in conflict even after South Sudan did referendum of secession in 2011. This research use The Conflict Triangle theory and Conflict Dynamcis theory and is qualitative type that intend to understand social phenomenon. The research results are Sudan and South Sudan still in conflict even after South Sudan's secession because both parties has not reach agreement in South Sudan's oil transit price that will be exported through Port Sudan, both parties are accused in funding the rebel forces in each territory, and there is no agreement yet regarding border area especially Abyei. Author suggest Sudan and South Sudan should immediately discuss their conflict over border area so that conflict source can be resolved properly and dialogue between both parties should be necessary so there will be no misunderstandings abouth funding the rebel forces in each territory.

Keywords: *conflict, referendum of secession, Sudan, South Sudan*

Pendahuluan

Konflik adalah kondisi adanya pertentangan atau ketidakcocokan antara beberapa pihak (individu, kelompok, atau organisasi) (Glasl 2002) dimana para pihak tersebut berusaha untuk saling menggagalkan tercapainya tujuan dari pihak lain (Folger, Poolle dan Stutman 1993) yang dapat berupa status, kekuasaan, ataupun sumber daya yang bersifat langka (Coser 1956). Konflik merupakan salah satu fenomena sosial yang pasti terjadi di masyarakat dan dapat menjadi hal yang membangun maupun merusak. Menurut data dari SIPRI (2015), konflik masih terus meningkat sejak tahun 2000-an terutama di wilayah Afrika dan Timur Tengah. Begitu juga konflik di Afrika. Menurut *Global Peace Index (GPI)*¹ beberapa negara di kawasan Afrika tergolong dalam negara yang tidak aman dengan skor diatas 3, misalnya Somalia (3,368) dan Sudan Selatan (3,397).

¹ *The Global Peace Index (GPI)*, adalah indeks yang dibuat oleh Institute for Economics and Peace menggunakan 22 indikator untuk mengkategorikan 162 negara di dunia berdasarkan kondisi keamanan negara.

Ada dua etnis terbesar di Sudan, etnis Arab dan etnis Afrika. Jumlah etnis Afrika lebih banyak dari etnis Arab, namun etnis Arab lebih mendominasi pemerintahan sehingga kebijakan – kebijakan yang dikeluarkan pemerintah cenderung memihak etnis Arab. Seperti misalnya pembagian wilayah, etnis Arab bermukim di daerah utara yang lebih subur. Pendapatan dari minyak pun yang kebanyakan berasal dari wilayah selatan lebih banyak digunakan untuk membangun wilayah utara. Oleh karena perlakuan tidak adil inilah muncul perang saudara di Sudan. Perang saudara yang pertama terjadi adalah saat suku Anya-nya di Sudan bagian selatan yang mayoritas etnis Afrika penganut Kristen dan animisme melawan pemerintah Sudan pada tahun 1956 yang berakhir saat ditandatanganinya *Addis Ababa Agreement* pada 1972 yang menghasilkan daerah otonomi khusus di Sudan bagian selatan. Kelompok pemberontak kembali muncul di Darfur dengan nama *Sudan People's Liberation Movement/Army* (SPLM/A) dan *Justice and Equality Movement* (JEM). Kelompok ini menginginkan sumber daya dan perlakuan yang adil dari pemerintah. Pemerintah Sudan membuat pasukan tandingan untuk menandingi SPLM/A dan JEM. Pasukan ini bernama Janjaweed yang terdiri atas suku nomaden Arab Rizeigat, Misseriya dan Abbala yang dijanjikan tanah oleh pemerintah Sudan.

Untuk menghentikan konflik antara kelompok pemberontak dan Janjaweed Presiden Chad, Idriss Déby menjadi mediator antara kedua pihak dalam perundingan gencatan senjata 45 hari pada 2003, namun perjanjian ini gagal. Uni Afrika atas permintaan SPLM/A menjadi mediator dalam perundingan kembali tahun 2004 untuk membahasa gencatan senjata dan masuknya bantuan kemanusiaan ke Darfur. Kedua pihak juga menandatangani *Darfur Peace Agreement* pada 2006, namun hanya SPLM/A MM² yang menandatangani perjanjian tersebut. SPLM/A AW³ tidak mau menandatangani *Darfur Peace Agreement* karena pembagian kekuasaan dan kompensasi yang dijanjikan tidak sesuai yang mereka minta.

Konflik yang sudah berlangsung sejak lama terus berlangsung hingga akhirnya Sudan Selatan merdeka dari Sudan lewat referendum pemisahan diri tahun 2011. Namun, setelah Sudan Selatan merdeka dari Sudan, konflik masih terus berlanjut di antara kedua negara. *Sudan People's Liberation Army* (SPLA) menyebrang ke Sudan dan militer Sudan mengebom desa – desa di perbatasan. Bahkan, konflik antara Sudan dan Sudan Selatan mengarah ke perang antara kedua negara (Ottaway dan El-Sadany 2012). Maka timbullah pertanyaan, mengapa masih terjadi konflik antara Sudan dan Sudan Selatan setelah adanya referendum pemisahan diri Sudan Selatan dari Sudan? Penelitian ini menggunakan teori segitiga konflik milik Johan Galtung, dan dinamika konflik milik Peter Wallensteen untuk menjawab pertanyaan diatas.

Pembahasan

Konflik Sebelum Referendum Pemisahan Diri

Konflik antara suku Anya-Nya di Sudan bagian selatan dan pemerintah Sudan pada tahun 1956 terjadi sampai ditandatanganinya *Addis Ababa Agreement* pada 1972. Namun perjanjian ini hanya berlangsung sampai tahun 1983 pada saat presiden Ja'far Nimeiri memberlakukan politik Arabisasi dan Islamisasi di Sudan bagian selatan. Suku asli di Kordofan Selatan, suku Nuba di Nil Biru, suku Ingessana dan suku Uduk menjadi korban dari politik ini. Pemerintah Sudan menambang minyak dan mineral di Kordofan Selatan, Nil Biru dan beberapa daerah di wilayah selatan untuk membangun Sudan bagian utara. Penduduk Sudan bagian selatan tidak boleh mengikuti pemilu pada 1965. Pada saat Omar al-Bashir dilantik menjadi presiden pada 1989, beliau menginginkan Sudan untuk menjadi

² SPLM/A MM adalah SPLM/A yang dipimpin oleh Minni Minnawi

³ SPLM/A AW adalah SPLM/A yang dipimpin oleh Abdul Wahid

negara Islam. Penduduk Sudan bagian selatan yang bukan penganut Islam menolak rencana ini.

Konflik di Darfur sendiri terjadi saat SPLM/A dan JEM yang berbasis di Darfur berkonflik dengan Janjaweed yang menyebabkan kejahatan kemanusiaan berat terjadi. SPLM/A dan JEM ini menuntut hak mereka sebagai warga negara Sudan untuk diperlakukan secara adil dalam bidang ekonomi dan politik. Tujuan SPLM/A sebagaimana *press release* tanggal 14 Maret 2003 adalah (Collins 2006):

“a united democratic Sudan ... predicated on full acknowledgment of Sudan’s ethnic, cultural, social, and political diversity. Viable unity, therefore, must be ultimately based on the right of self-determination.... The fundamental imperatives of a viable unity are an economy and political system that address the uneven development and marginalization that have plagued the country since independence.... Religion and politics ... must be kept in their respective domains, with religion belonging to the personal domain and the state in the public domain... . SPLM/A firmly opposes ... the Khartoum Government’s policies of using some Arab tribes ... to achieve its hegemonic devices that are detrimental both to Arabs and non-Arabs... . [Consequently], the brutal oppression, ethnic cleansing, and genocide sponsored by the Khartoum Government [have] left the people of Darfur with no other option but to resort to popular political and military resistance for the purpose of our survival”

Janjaweed mulai melakukan pembersihan etnis di Darfur bagian selatan pada Oktober 2002 dengan cara membunuh laki – laki, memperkosa perempuan dan menculik anak – anak. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Colin L. Powell mengatakan kepada The US Senate Foreign Relations Committee, bahwa “...we conclude, I conclude, that genocide has been committed in Darfur and that the government of Sudan and the Janjaweed bear responsibility and that genocide may still be occurring” (Totten dan Markusen 2006). Jonathan P. Howard dalam Totten dan Markusen (2006), menulis kejahatan kemanusiaan di Darfur paling banyak adalah pembunuhan. Selain pembunuhan, penghancuran properti juga banyak terjadi di Darfur antara lain penghancuran desa, pencurian hewan ternak dan pengeboman melalui udara.

Antara Sudan dan SPLM/A dan JEM sudah beberapa kali menandatangani perjanjian damai, di antaranya gencatan senjata selama 45 hari yang dilakukan di kota Abéché pada 2003 yang diprakarsai oleh Idriss Déby, Presiden Chad. Namun perjanjian ini gagal karena SPLM/A dan JEM mengingkari perjanjian tersebut; Uni Afrika membantu perundingan gencatan senjata lagi di Chad; penandatanganan *The Agreement on the Modalities for the Establishment of the Ceasefire Commission and Deployment of Observers* di Addis Ababa pada Mei 2004; penandatanganan *Comprehensive Peace Agreement* pada 9 Januari 2005; penandatanganan *Declaration of Principle* pada Mei 2005 yang ditandatangani oleh pemerintah Sudan, SPLM/A dan JEM; serta penandatanganan *Darfur Peace Agreement* di Abuja pada Mei 2006, dimana perjanjian ini hanya ditandatangani oleh pemerintah Sudan dan SPLM/A MM

Referendum pemisahan diri Sudan Selatan dilakukan berdasarkan *Comprehensive Peace Agreement* (CPA) yang ditandatangani oleh National Congress Party (NCP) dan SPLM/A untuk menghentikan perang dari tahun 1980-an. CPA ini merupakan penegasan dari *Intergovernmental Authority on Development-mediated Declaration of Principle* dan mempunyai prinsip penentuan nasib sendiri demi perdamaian di Sudan. CPA mempunyai jangka waktu enam tahun yang dimulai sejak 9 Juli 2005. Selama masa berlaku CPA,

kedua pihak sepakat untuk mendirikan Government of National Unity dengan presentasi kursi kepemimpinan 52% NCP, 28% SPLM/A dan pihak lain 20% (European Union Election Observation Mission 2011). Sudan bagian selatan mendapat otonomi khusus dengan dibuatnya Government of Southern Sudan yang dipimpin oleh John Garang (Temin dan Woocher 2012) dengan presentase kursi kepemimpinan SPLM/A 70%, NCP 15% dan partai lain 15%.

Referendum Pemisahan Diri Sudan Selatan

Referendum pemisahan ini dilakukan untuk menentukan nasib Sudan wilayah selatan apakah tetap masuk dalam negara Sudan atau membangun negara sendiri. Referendum ini berpedoman pada *Comprehensive Peace Agreement*. Pada tahun 2009, dibuat *Referendum Act* yang berfungsi sebagai acuan dalam melakukan referendum. Menurut *Referendum Act*, referendum valid hanya jika jumlah vote setidaknya 60% dari *voter* memilih untuk merdeka (The Carter Center 2011). Referendum akan dilaksanakan di Sudan bagian utara, selatan dan delapan lokasi di negara lain. *Referendum center* bisa didirikan di tempat dimana paling tidak ada 20.000 *voter* disitu. Menurut *Referendum Act*, *internally displaced persons* berhak menjadi *voter* dan ada tiga kategori yang berhak menjadi *voter*, yaitu yang lahir dari paling tidak satu orang tua penduduk asli Sudan bagian selatan yang tinggal di Sudan bagian selatan/ sebelum 1 Januari 1956; yang leluhurnya bisa ditemukan pada etnis Sudan bagian selatan tanpa paling tidak satu orang tuanya penduduk asli Sudan bagian selatan/ sebelum 1 Januari 1956; dan yang penduduk tetap Sudan bagian selatan sejak 1 Januari 1956.

Referendum pemisahan diri Sudan bagian selatan diatur oleh Southern Sudan Referendum Commission yang merupakan lembaga independen yang berbasis di Khartoum dan Southern Sudan Referendum Bureau yang merupakan anak dari Southern Sudan Referendum Commission berbasis di Juba. Registrasi *voter* dilakukan dari 15 November 2010 sampai 8 Desember 2010 dan referendum dilakukan pada 9 Januari 2011 sampai 15 Januari 2011. Hasil dari referendum diumumkan secara resmi pada 7 Februari 2011 dengan hasil 97,58% dari 3.947.676 *voter* menginginkan Sudan bagian selatan merdeka dari Sudan (European Union Election Observation Mission 2011). Sudan Selatan resmi menjadi negara baru pada 9 Juli 2011 dengan nama resmi Republic of South Sudan, tepat 6 tahun setelah berlakunya CPA.

Konflik Sesudah Referendum Pemisahan Diri

Setelah Sudan Selatan merdeka, konflik masih terus berlanjut di kedua negara. Yang pertama adalah konflik minyak. Sebenarnya Sudan tidak menyukai kemerdekaan Sudan Selatan karena ladang minyak menjadi berada di wilayah selatan. Perusahaan minyak yang masih di Sudan hanya Petro Energy dan Greater Nile Petroleum Operating Company (GNPOC), sedangkan perusahaan minyak yang menjadi aktif di Sudan Selatan adalah Petrodar, GNPOC, dan White Nile Petroleum Operating Company (WNPOC)/Thar Jath.

Gambar 1 Kilang Minyak di Sudan dan Sudan



Sumber : Drilling International

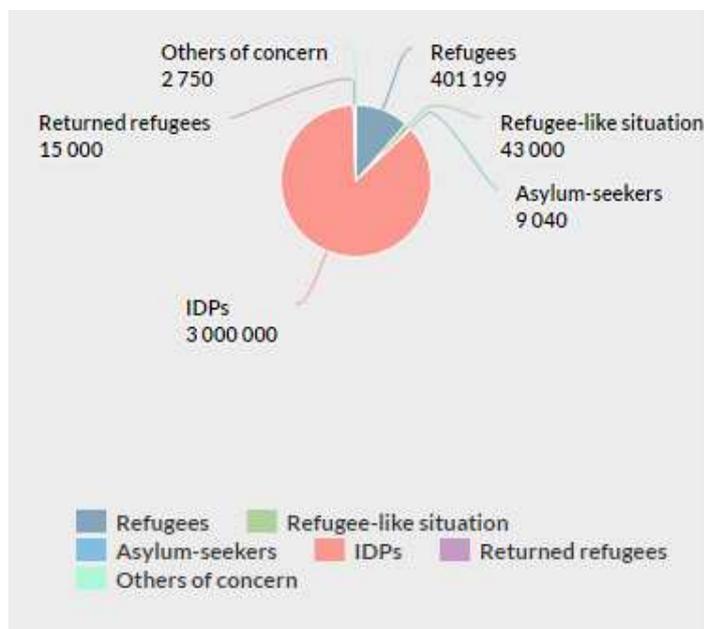
Karena Sudan Selatan adalah negara *landlocked*, Sudan Selatan membutuhkan pipa minyak milik Sudan untuk mengekspor minyaknya melalui *Port Sudan*. Biaya penggunaan pipa minyak ini menjadi perselisihan antara Sudan dan Sudan Selatan. Sudan meminta biaya US\$ 32 dan Sudan Selatan meminta US\$ 1. Yang kedua adalah konflik perbatasan, pembahasan mengenai perbatasan antara kedua negara terutama di wilayah Kordofan Selatan, Nil Biru dan kota Abyei masih belum final. Kedua negara juga saling tuduh mendukung aktivitas pemberontak di masing – masing wilayah negara. Ketiga, konflik internal di Sudan Selatan antara Presiden Salva Kiir dan mantan Wakil Presiden Riek Machar.

Konflik di Sudan Selatan terjadi karena Machar secara terbuka menantang kepemimpinan Kiir yang belum bisa membawa Sudan Selatan kearah yang lebih baik. Setelah Kiir memecat Machar tentara terbagi menjadi dua, tentara yang royal kepada Machar dan yang royal kepada Kiir. Salva Kiir menyalahkan Riek Machar atas terjadinya konflik di Sudan Selatan dan menuduh bahwa Riek Machar berusaha meng kudeta dirinya. Untuk menghentikan konflik, ditandatangani *Compromise Agreement on the Resolution of the Conflict in the South Sudan* dengan bantuan dari *Intergovernmental Authority on Development*, namun perjanjian ini dilanggar oleh SPLM/A dengan mengambil paksa bahan bakar dan peralatan yang dibawa UNMISS⁴ melewati Sungai Nil dan menahan 18 orang tentara UNMISS dan 13 orang awak kapal lokal. Keempat, kondisi negara Sudan

⁴ UNMISS (United Nations Mission in the Republic of South Sudan) adalah pasukan penjaga perdamaian PBB yang diturunkan ke Sudan Selatan dengan mengadopsi resolusi 1996 (2011). Pasukan penjaga perdamaian ini diturunkan ke Sudan Selatan karena kondisi di Sudan Selatan dapat mengancam perdamaian regional dan internasional. Setelah adanya konflik di Sudan Selatan pada 2013, Dewan Keamanan PBB membuat resolusi 2155 (2014) yang memerintahkan UNMISS untuk memprioritaskan keamanan warga sipil, memonitor human right, membantu pengiriman bantuan kemanusiaan dan implementasi *Cessation of Hostilities Agreement*.

yang lemah karena dipimpin oleh orang yang sama dari tahun 1980-an, masyarakat Sudan yang kurang puas dengan pemerintah Sudan dan banyaknya *internally displaced persons* di Sudan.

Gambar 2 Data Displaced People di Sudan



Sumber : UNHCR

Dari data di atas, dapat dilihat bahwa presentasi *internally displaced persons* di Sudan paling tinggi dengan jumlah mencapai 3 juta orang diantara jumlah yang lain misalnya pengungsi dan pencari suaka.

Konflik juga terjadi di Kordofan Selatan dan Nil Biru. Konflik terjadi karena SPLM/A yang mendirikan barak militer di kedua wilayah tersebut dilucuti senjatanya secara paksa oleh pemerintah Sudan pada Juni 2011. Pemaksaan ini memicu terjadinya konflik di Kadugli, ibu kota Kordofan Selatan antara SPLA dan Sudan Armed Force (SAF) yang akhirnya menyebar. Konflik juga dipicu karena terpilihnya kembali Ahmed Haroun sebagai gubernur, padahal beliau merupakan salah satu target International Criminal Court atas kejahatan kemanusiaan berat di Darfur (Human Right Watch 2012). Pada saat terjadi konflik, pasukan Sudan mengebom lewat udara dan menembaki penduduk tanpa membedakan mana kombatan dan non kombatan yang menyebabkan banyak penduduk lokal menjadi korban, penduduk lokal juga menderita kekurangan air, makanan, layanan kesehatan dan menjadi *internally displaced persons*. Untuk menghentikan konflik ini, kedua pihak menandatangani *Framework Agreement on Political and Security Arrangements for Southern Kordofan and Blue Nile* yang berdasarkan prinsip demokrasi CPA. Namun, perjanjian ini tidak diimplementasikan oleh pemerintah Sudan yang mengirimkan militernya untuk menurunkan gubernur terpilih Nil Biru beserta stafnya. Pada September 2011, Sudan kembali memaksa tentara di Nil Biru untuk melucuti senjatanya dan peristiwa ini kembali memicu konflik.

Analisis Konflik Sudan dan Sudan Selatan Pasca Referendum Pemisahan Diri: Segitiga Konflik Johan Galtung

Sebelum Sudan Selatan merdeka, masyarakat Sudan bagian selatan merasa pemerintah Sudan hanya memperhatikan kesejahteraan masyarakat di Sudan bagian utara walaupun ladang minyak kebanyakan berada di selatan sehingga pada saat Sudan Selatan merdeka, mereka merasa terlepas dari “penjajah”. Pada saat awal kemerdekaan Sudan Selatan, produksi minyak Sudan Selatan sempat terhenti karena belum adanya kesepakatan biaya pipa minyak. Sudan tidak menyukai kemerdekaan Sudan Selatan karena $\frac{2}{3}$ kilang minyak milik Sudan menjadi berada di wilayah Sudan Selatan. Untuk menutupi pendapatan Sudan yang berkurang di sektor minyak, Sudan meminta biaya lebih dari US\$ 32 per barel yang termasuk biaya transit, transportasi, proses dan penggunaan pelabuhan (Kamau dan Schneidman 2012).

Karena Sudan Selatan merupakan *landlocked country*, Sudan harus menggunakan pipa minyak milik Sudan untuk mengekspor minyaknya lewat *Port* Sudan. Sebenarnya Sudan Selatan mempunyai alternatif lain untuk dapat mengekspor minyaknya, yaitu dengan menggunakan truk melewati Etiopia dan Djibouti ke pelabuhan di Laut Merah, namun Sudan Selatan memilih menggunakan pipa minyak milik Sudan. Penggunaan pipa minyak milik Sudan oleh Sudan Selatan bukan tanpa kesalahpahaman antara kedua pihak. Sudan Selatan lewat Pagan Anum selaku kepala negosiator Sudan Selatan menuduh Sudan mencuri minyak milik negaranya yang akan diekspor seharga US\$ 815 juta, tuduhan ini dibantah oleh Presiden Omar al-Bashir. Namun, Sudan mengatakan bahwa mereka akan mengambil minyak Sudan Selatan sebesar 23% (BBC 2011) untuk mengganti biaya transit yang belum tercapai kesepakatan.

Sebelum Sudan Selatan merdeka, warga etnis Arab menempati wilayah bagian utara yang subur dan mendapatkan kursi yang lebih banyak di pemerintahan. Sedangkan warga etnis Afrika menempati wilayah selatan yang tandus dan mendapatkan kursi yang lebih sedikit di pemerintahan bahkan tidak diizinkan mengikuti pemilu. Presiden Omar al-Bashir pernah memaksa Sudan untuk menjadi negara Islam dan menerapkan hukum Islam di Sudan. Warga ras Afrika yang mayoritas beragama Nasrani menolak rencana al-Bashir. Setelah Sudan Selatan merdeka, pendapatan Sudan dari sektor minyak menurun. Presiden yang sudah memimpin dari tahun 1989 masih berkuasa sampai sekarang sehingga kondisi politik negara lemah.

Walaupun pendapatan Sudan Selatan dari sektor minyak mencapai \pm 7,3 milyar pada tahun 2011 – 2014, jalan di Sudan Selatan 98% masih berupa tanah dan angka kemiskinan di Sudan Selatan mencapai 44,7% pada tahun 2011, jumlah ini meningkat pada 2015 menjadi 57,2% (Vickers, Global Witness : Turning the Tide 2015). Keadaan ini membuat warga Sudan Selatan mencurigai adanya korupsi yang dilakukan petinggi negaranya. Namun, penyebab kemiskinan di Sudan Selatan adalah karena pendapatan Sudan Selatan banyak digunakan untuk kemiliteran dan membayar hutang kepada perusahaan minyak yang beroperasi di Sudan Selatan. Pada 2015, Sudan Selatan meminjam US\$ 1 milyar dari perusahaan – perusahaan minyak menurut anggaran tahunan yang diumumkan pada 2014 (Vickers 2014). Dari anggaran tersebut, 35% digunakan untuk sektor keamanan dan hanya 12% yang digunakan untuk fasilitas kesehatan, infrastruktur dan pendidikan. Dana lain digunakan untuk membayar hutang dan membayar tentara.

Sudan juga menganggarkan 25% dari total anggaran tahunannya untuk pertahanan. Jumlah ini bahkan diyakini lebih tinggi lagi mencapai 70%. Anggaran untuk pertahanan sangat besar jumlahnya dibanding anggaran untuk kesehatan yang hanya 1% dan pendidikan 2,3%. Setelah Sudan Selatan merdeka, anggaran negara dibebankan kepada penduduk Sudan melalui pajak.

Dengan merdekanya Sudan Selatan dari Sudan melalui referendum pemisahan diri tidak serta merta membuat kedua negara menjadi tetangga yang rukun. Sudan dan Sudan Selatan masih berselisih paham mengenai perbatasan terutama di Kordofan Selatan dan Nil Biru. Daerah Abyei juga belum diadakan referendum untuk menentukan nasibnya apakah masuk ke Sudan atau Sudan Selatan.

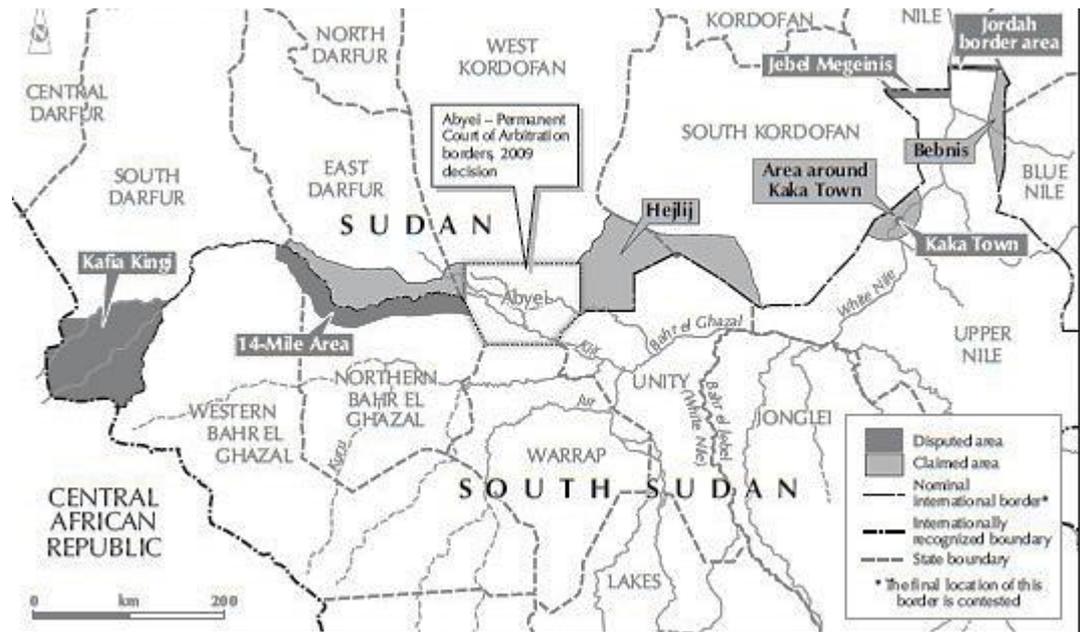
Aksi destruktif merupakan aksi yang merusak. Saat terjadi konflik di Kordofan Selatan pada 5 Juni 2011 yang kemudian menyebar sampai ke Nil Biru pada 1 September 2011 antara tentara Sudan dan SPLA, tentara Sudan mengebom melalui udara dan menembaki pemukiman penduduk tanpa membedakan kombatan dan non kombatan yang mana hal ini melanggar hukum humaniter internasional. Tentara Sudan menggunakan *MiG Jet Fighters*, *Antonov Bombers*, dan penembakan melalui darat untuk menyerang kota dan perkemahan pengungsi di Sudan Selatan (BBC 2012). Konflik ini terjadi karena ketidaksepahaman pengaturan keamanan di negara bagian tersebut dan kemenangan Gubernur Ahmed Haroun saat beliau masuk dalam daftar orang yang dicari oleh International Criminal Court atas kejahatan di Darfur.

Tentara Sudan tidak hanya mengebom dan menembaki pemukiman, tapi juga membakar, menjarah harta benda milik penduduk, melakukan penahanan paksa, dan melakukan pemerkosaan kepada wanita – wanita di desa yang mereka serang (Human Right Watch 2012). Sudan juga melucuti paksa senjata tentara SPLA yang ada di Kordofan Selatan dan Nil Biru. Pelucutan senjata ini berlanjut menjadi konflik di Kadugli, ibukota Kordofan Selatan. Sudan secara militer menurunkan paksa Malik Agar, gubernur terpilih Nil Biru beserta stafnya dan menggantinya dengan komandan militer (Human Right Watch 2012).

Selain konflik di Kordofan Selatan dan Nil Biru, tentara Sudan menyerang Abyei yang mana wilayah ini masih menjadi sengketa antara Sudan dan Sudan Selatan yang terkenal kaya minyak. Ladang minyak di daerah Abyei menghasilkan sampai 76.600 barel per hari (Hamilton 2010). Sebenarnya, Abyei pernah melakukan referendum sendiri namun hasilnya tidak mendapat persetujuan nasional maupun internasional. Sampai sekarang, referendum belum dilakukan di Abyei karena belum ada keputusan siapa yang berhak menjadi voternya. Serangan Sudan ke Abyei terjadi pada musim semi 2011, tentara Sudan menghancurkan properti milik penduduk dan membuat 110.000 orang suku Ngok Dinka kehilangan tempat tinggal (Enough Project). Tentara Sudan mundur dari Abyei setelah digantikan oleh penjaga perdamaian dari Etiopia.

Pada 2012, terjadi konflik bersenjata di Heglig yang diperebutkan oleh Sudan dan Sudan Selatan. Menurut Permanent Court of Arbitration, Heglig masuk dalam wilayah Sudan (Shaib 2012) karena pada perundingan kemerdekaan Sudan Selatan, Sudan Selatan tidak mengklaim Heglig. Namun pada April 2012, Sudan Selatan merebut ladang minyak yang ada di Heglig dan mengklaim Heglig masuk dalam wilayah Sudan Selatan dengan melihat CPA yang menyatakan bahwa Heglig masuk teritori selatan berdasarkan perbatasan utara – selatan pada 1956 (Ylönen).

Gambar 3 Peta Daerah Sengketa Sudan dan Sudan Selatan



Sumber : Joshua Craze "Contested Borders: Continuing Tensions over the Sudan – South Sudan Border" hlm. 12

Pada Maret 2012, konflik pertama terjadi antara tentara Sudan dan Sudan Selatan di Heglig. Sudan mengebom sebuah fasilitas minyak yang ada di dekat kota Bentiu, negara bagian Unity. Lalu pada April 2012, Sudan kembali melakukan serangan di kota Teshwin, Sudan Selatan. Sebagai balasan atas penyerangan ini, Sudan Selatan mengirim 5.000 tentaranya untuk menduduki kota Heglig pada 10 April 2012 dan menyebutnya sebagai *self-defense* (Check dan Mdlongwa 2012). Sebanyak 19 tentara Sudan Selatan tewas dan 240 tentara Sudan tewas dalam 10 hari Sudan Selatan menduduki Heglig (Ruslan 2012). Masuknya tentara Sudan Selatan ke Heglig merupakan langkah yang diambil Sudan Selatan untuk menunjukkan kemampuan militernya kepada Sudan. Sudan Selatan akhirnya mundur dari Heglig pada 20 April 2012 setelah mendapat tekanan dari dunia internasional.

Aksi konstruktif merupakan aksi yang membangun dari aktor konflik. aksi membangun dari para aktor dapat dilihat ketika terjadi konflik di Kordofan Selatan dan Nil Biru, Sudan menandatangani *Framework Agreement on Political and Security Arrangements for Southern Kordofan and Blue Nile* yang salah satu poinnya adalah negosiasi damai dalam penyelesaian sengketa. Perjanjian juga dilakukan oleh kedua negara pada saat konflik di Heglig, kedua negara sepakat untuk menarik mundur seluruh pasukannya dari Heglig. Sudan dan Sudan Selatan juga sepakat dalam biaya penggunaan pipa minyak milik Sudan oleh Sudan Selatan. Kemerdekaan Sudan Selatan dari Sudan yang dilakukan dari 9 Januari 2011 – 15 Januari 2011 juga bisa dikategorikan sebagai aksi konstruktif.

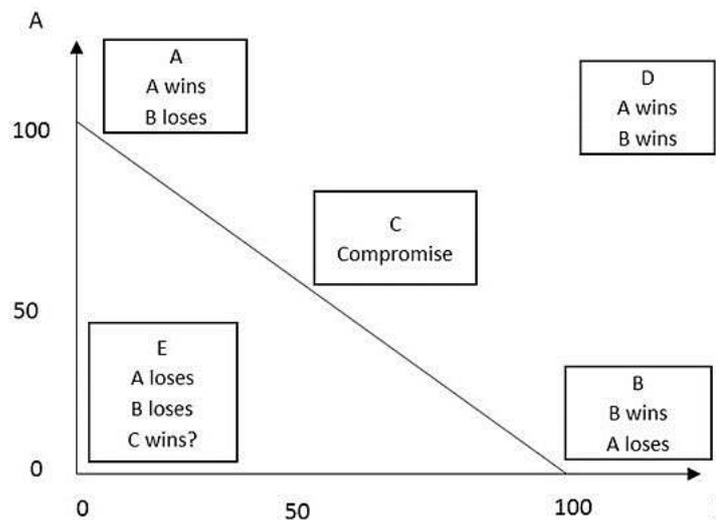
Pada Maret 2012, kedua negara bertemu di Addis Ababa untuk membahas kewarganegaraan dan perbatasan, selain itu kedua negara juga sepakat mengadakan konferensi tingkat tinggi presiden (Hsiao 2012). Setelah terjadinya konflik di Heglig, Sudan dan Sudan Selatan kembali bertemu dengan bantuan Dewan Keamanan dan Perdamaian Uni Afrika pada 24 April 2012 untuk membahas gencatan senjata dan hal – hal lain yang belum terselesaikan. Lalu pada 27 September 2012, *demilitarized zone* dibentuk di perbatasan kedua negara dan ekspor minyak Sudan Selatan lewat pipa minyak Sudan kembali dilanjutkan (Yousif dan Rothbart 2012). Sudan dan Sudan Selatan

menandatangani *Agreement between The Government of the Republic of South Sudan and The Government of the Republic of the Sudan on Oil and Related Economic Matters*, *Agreement on Security Arrangements between The Republic of the Sudan and The Republic of South Sudan*, *Agreement on a Framework for Cooperation on Central Banking Issues between The Republic of the Sudan and The Republic of South Sudan*, dan *Agreement on Trade and Trade Related Issues Between The Republic of the Sudan and The Republic of South Sudan*.

Dinamika Konflik Peter Wallensteen

Peter Wallensteen mengatakan ada tiga kategori dalam setiap konflik, yaitu ada aksi, ketidakcocokan dan aktor. Aksi dari para aktor saling berbalas satu sama lain sehingga sulit diketahui siapa yang lebih bertanggung jawab atas terjadinya konflik (Wallensteen 2004). Aktor juga tidak punya pilihan selain terus bereaksi pada ancaman – ancaman atau aksi dari aktor lain sehingga jika suatu konflik tidak segera dilakukan resolusi konflik, konflik akan terus terjadi.

Gambar 4 Kemungkinan Hasil dari Konflik



Sumber : Peter Wallensteen “Understanding Conflict Resolution” hlm. 37

Gambar di atas menunjukkan lima hal yang mungkin aktor dapatkan dari konflik. kondisi C dan D adalah kondisi yang paling diinginkan oleh para aktor karena menguntungkan mereka. Sedangkan kondisi A dan B adalah kondisi dimana salah satu aktor harus rela tujuannya tidak tercapai. Kondisi E adalah kondisi yang paling buruk dimana para aktor utama tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan dan aktor lain yang mendapatkannya atau jika sumber daya yang para aktor inginkan rusak atau hilang karena konflik.

Penulis mengibaratkan Sudan sebagai aktor A dan Sudan Selatan sebagai aktor B. Kondisi B terjadi saat aktor B merdeka dari aktor A pada tahun 2011 melalui referendum pemisahan diri berdasarkan CPA tahun 2005. Kondisi C terjadi saat aktor A dan aktor B sepakat menghentikan konflik di Heglig pasca kemerdekaan aktor B. Kondisi D terjadi saat aktor A dan aktor B sepakat mengenai biaya penggunaan pipa minyak milik Sudan oleh Sudan Selatan sebesar US\$ 9 – 11 per barelnya dan Sudan Selatan juga sepakat untuk membayar biaya *Transitional Financial Assistance* dan US\$ 25 per barel untuk membayar hutang.

Kesimpulan

Dari analisis yang sudah penulis paparkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa penyebab Sudan dan Sudan Selatan masih berkonflik setelah referendum pemisahan diri Sudan Selatan adalah pertama, belum terjadi kesepakatan harga pipa minyak milik Sudan yang digunakan oleh Sudan Selatan untuk mengeksport minyaknya melalui Port Sudan. Kedua, pembahasan mengenai perbatasan kedua negara yang masih belum final terutama di wilayah Abyei dan terakhir saling tuduh antara Sudan dan Sudan Selatan yang mendanai pemberontak di masing – masing wilayah.

Penulis menyarankan Sudan dan Sudan Selatan untuk segera membahas perbatasan antara kedua negara terutama di wilayah Abyei. Untuk Uni Afrika, penulis menyarankan Uni Afrika perlu mengawasi jalannya kesepakatan – kesepakatan bilateral antara Sudan dan Sudan Selatan. Untuk PBB, penulis menyarankan untuk lebih banyak menempatkan menjaga perdamaian di daerah konflik.

Referensi

- BBC. 2011. *Africa : Sudan 'stealing oil' from South - Pagan Amum*. 1 Desember. Diakses September 21, 2016. <http://www.bbc.com/news/world-africa-15983251>.
- . 2012. *South Sudan accuses Khartoum of bombing its territory*. 9 Mei. Diakses Oktober 20, 2016. <http://www.bbc.com/news/world-africa-18011930>.
- Check, Nicasius Achu, dan Thabani Mdlongwa. 2012. “The Heglig Oil Conflict: Exercise of Sovereignty or an Act of Aggression?” *Policy Brief* 1-6.
- Collins, Robert O. 2006. “Disaster in Darfur : Historical Overview.” Dalam *Genocide In Darfur*, oleh Samuel Totten dan Eric Markusen, 3-24. New York: Routledge.
- Coser, A. Lewis. 1956. *The Functions of Social Conflict*. New York: Free Press.
- Enough Project. t.thn. *Tensions between the Two Sudans*. Diakses Agustus 22, 2016. <http://www.enoughproject.org/conflicts/sudans/tensions-two-sudans>.
- European Union Election Observation Mission. 2011. *Final Report: Southern Sudan Referendum 9-15 January 2011*. Observasi, European Union.
- Folger, Joseph P, Marshall S Poolle, dan Randall K Stutman. 1993. *Working Through Conflict: Strategies for Relationships, Groups and Organizations*. New York: Harper Collins College Publishers.
- Glasl, Friedrich. 2002. *Conflict Management*. Bern/Stuttgart: Paul Haupt Verlag.
- Hamilton, Rebecca. 2010. *The Christian Science Monitor*. 2 November. Diakses Desember 4, 2016. <http://www.csmonitor.com/World/Africa/Africa-Monitor/2010/1102/Oil-rich-Abyei-Time-to-update-the-shorthand-for-Sudan-s-flashpoint-border-town>.
- Hsiao, Amanda. 2012. “South Sudan and Sudan Back to War?” *The Enough Project* i-14.
- Human Right Watch. 2012. *Under Siege : Indiscriminate Bombing and Abuses in Sudan’s Southern Kordofan and Blue Nile States*. Penelitian, Human Rights Watch.
- Kamau , Anne W, dan Witney Schneidman. 2012. *South Sudan: Resolving the Oil Dispute*. 23 Maret. Diakses September 21, 2016. <https://www.brookings.edu/opinions/south-sudan-resolving-the-oil-dispute/>.
- Ottaway, Marina, dan Mai El-Sadany. 2012. “Sudan: From Conflict to Conflict.” *Carnegie Endowment for International Peace* i-31.
- Ruslan, Heri. 2012. *Republika Internasional : Berebut Ladang Minyak, 1.000 Tentara Sudan Selatan Tewas*. 23 April. Diakses Agustus 24, 2016. <http://internasional.republika.co.id/berita/internasional/global/12/04/23/m2xhf1-berebut-ladang-minyak-1000-tentara-sudan-selatan-tewas>.
- Shaib, Abdelkhalig. 2012. *Al Jazeera : It's not just why Heglig, but why now?* 9 Mei. Diakses Agustus 22, 2016. <http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2012/05/2012568179201627.html>.

- SIPRI. 2015. *SIPRI Yearbook 2015*. Annual Report, Stockholm: SIPRI.
- Temin, Jon, dan Lawrence Woocher. 2012. *Learning from Sudan's 2011 Referendum*. Research, Washington DC: United States Institute of Peace.
- The Carter Center. 2011. *Observing the 2011 Referendum on the Self-Determination of Southern Sudan*. Observasi, Atlanta: The Carter Center.
- Totten, Samuel, dan Eric Markusen. 2006. *Genocide in Darfur: Investigating Atrocities in the Sudan*. New York: Routledge.
- Vickers, Emma. 2015. *Global Witness : Turning the Tide*. 10 November. Diakses Agustus 21, 2016. <https://www.globalwitness.org/en/reports/turning-tide/>.
- . 2014. *Three Years In, Is South Sudan's Oil Driving Its Crisis?* 9 Juli. Diakses Oktober 2, 2016. <https://www.globalwitness.org/en/blog/three-years-south-sudans-oil-driving-its-crisis/>.
- Wallensteen, Peter. 2004. *Understanding Conflict Resolution*. London: Sage Publications.
- Ylönen, Aleksi. t.thn. "The Sudan - South Sudan Military Escalation In Heglig: Shifting Attention From Domestic Challenges." 11-19.
- Yousif, Adeeb, dan Daniel Rothbart. 2012. "Sudan and South Sudan: Post-Separation Challenges." *Beyond Intractability*.